

KABUPATEN BANYUWANGI

BUKU

# PEDOMAN TEKNIS

## INOVASI SERUNI

SISTEM INFORMASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

oleh

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya  
Perumahan dan Permukiman



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 101 Tlp. (0333) 421695 Fax. 410445  
**BANYUWANGI**

---

**PROPOSAL**  
**INOVASI SERUNI**  
**(Sistem Informasi Layak Huni)**

**1.1 Rancang bangun Inovasi SERUNI**

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bercita-cita agar seluruh keluarga di Indonesia menempati tempat tinggal yang layak sehat aman dan legal, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang (sangat) miskin (MBR) tidak mampu menjangkau rumah atau kaveling yang legal, sehat, memenuhi syarat. Selain harganya yang tinggi, stok-nya juga tidak tersedia untuk jenis yang sesuai dengan kemampuan MBR/miskin. Pemerintah mencoba menerapkan konsep Rumah Sangat Sederhana (RSS) tetapi harganya tetap tidak terjangkau oleh MBR, dan jumlah produksinya juga sangat terbatas. Sementara itu tanah perkotaan dan ruang-ruang kota yang sesuai planning/RTR habis dimiliki/dikuasai oleh masyarakat yang lebih mampu.

Di negara berkembang (Indonesia) yang masih menghadapi masalah ekonomi berkepanjangan, pengangguran dan pendapatan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka mencari tempat tinggal atau membangun dengan kemampuan seadanya sehingga tumbuh dan berkembang rumah-rumah tidak layak huni atau kumuh. Perumahan kumuh berkembang pada daerah- daerah yang pengawasannya kurang baik atau tidak terjaga.

Pemerintah sebagai pembina, pengawas dan pengendali pembangunan perumahan selayaknya memahami fenomena ini sejak awal sehingga sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Aparat pemerintah yang berkaitan dengan perumahan masih banyak yang belum mengetahui akar masalah terjadinya perumahan tidak layak huni sehingga penyelesaiannya masih bersifat adhoc. Oleh sebab itu aparat pemerintah bidang perumahan harus diberi pengetahuan dan ketrampilan dalam menangani masalah perumahan tidak layak huni.

Kondisi perumahan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemiskinan suatu wilayah, diukur melalui kuantitas dan kualitas perumahan. Dalam arti umum, rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah, sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup manusia, rumah masuk dalam sebuah lingkaran kebutuhan pokok yang setiap insan harus memilikinya. Sebagai salah

satu kebutuhan primer bagi hidup manusia, rumah amat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh. Seiring berjalannya waktu, rumah berkembang menjadi sebuah identitas bagi pemiliknya. Rumah yang awalnya untuk tempat berlindung dari panas, hujan dan binatang luar, berubah menjadi status sosial sang pemilik. Rumah, dimasa kini menjadi gambaran jati diri, karakter dan nilai hidup seseorang.

Namun hingga saat ini masyarakat masih sangat sulit memiliki rumah sehingga muncul angka kekurangan kebutuhan rumah atau backlog yang tinggi. Pemerintah daerah belum memiliki angka yang pasti mengenai berapa kekurangan kebutuhan rumah atau backlog diwilayahnya. Untuk itu diperlukan perhitungan kebutuhan rumah atau backlog sebagai landasan pemerintah daerah dalam menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat.

Untuk itu dalam mendata Rumah Tidak Layak Huni yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi membuat sistem web aplikasi yang dinamakan SERUNI (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni) yang mana nantinya menginformasikan kepada masyarakat bahwa perubahan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni dengan detail nama dan alamat sub koordinat melalui akses digital maps. Hal ini mendukung program pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendigitalisasi Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk pertumbuhan bisnis dan pelayanan masyarakat.

## **1.2 Tujuan SERUNI**

Tujuan SERUNI adalah Menginventarisir data rumah, RTLH dan KK di Kabupaten Banyuwangi dan Menghitung kekurangan kebutuhan rumah atau backlog di Kabupaten Banyuwangi.

## **1.3 Manfaat SERUNI**

Manfaat yang diperoleh dari Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu Diketahuinya kebutuhan rumah atau backlog sebagai landasan pemerintah daerah dalam menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat

## **1.4 Hasil SERUNI**

Hasil dari SERUNI yaitu Besaran kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Kabupaten Banyuwangi dan jumlah Rumah dan RTLH di Kabupaten Banyuwangi

### 1.5 Tahapan Tahapan SERUNI

No	Kegiatan	Minggu Bulan Februari 2021			
		I	II	III	IV
1.	Persiapan dan Survey				
2.	Analisa				
3.	Laporan				

Banyuwangi, 5 Februari 2021

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN  
BANYUWANGI

**Danang Hartanto, ST**

Pembina

NIP. 197412042002121007